



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Surat Bupati Jepara Nomor 180/146 Perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Eksekutif pada tanggal 20 Oktober 2023 tentang Pembahasan Propemperda Kabupaten Jepara Tahun 2024.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 51).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 1 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA  
KETUA



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor : 27 Tahun 2023  
Tanggal : 1 November 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

| NO | SKPD<br>Pengusul | JENIS | TENTANG                                                 | MATERI<br>POKOK                                         | STATUS |      | DASAR PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                      | DISERTAI |                                  | UNIT/ INSTANSI<br>TERKAIT        | TARGET<br>PENYAM<br>PAIAN | KET |
|----|------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----|
|    |                  |       |                                                         |                                                         | BARU   | UBAH |                                                                                                                                                                                                                                        | NA       | Penjelasan<br>atau<br>Keterangan |                                  |                           |     |
| 1  | DPRD             | Perda | Penyelenggaraan<br>Pembangunan<br>Ketahanan<br>Keluarga | Penyelenggaraan<br>Pembangunan<br>Ketahanan<br>Keluarga | Baru   | -    | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<br>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial<br>3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga | NA       | -                                | 1. DP3AP2KB<br>2. BAPPEDA        | Agustus 2024              |     |
| 2  | DPRD             | Perda | Pendidikan<br>Pancasila dan<br>Wawasan<br>Kebangsaan    | Pendidikan<br>Pancasila dan<br>Wawasan<br>Kebangsaan    | Baru   | -    | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                          | NA       | -                                | 1. BAKESBANGPOL<br>2. DISDIKPORA | Agustus 2024              |     |
| 3  | DPRD             | Perda | Perlindungan<br>dan<br>Pemberdayaan<br>Petani           | Perlindungan dan<br>Pemberdayaan<br>Petani              | Baru   | -    | 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan<br>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani                                                    | NA       | -                                | DKPP                             | Agustus 2024              |     |

|   |                         |       |                                                                                                                  |                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                                                                               |    |                           |                                                                                              |                |          |
|---|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 4 | DISPERINDAG             | Perda | Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan                         | Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan                                                                                      | -    | Ubah | 1. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja;<br>2. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko                                                                                                 | NA | -                         | 1. BAG. PEREKONOMIAN<br>2. DPMPSTP<br>3. BAG. HUKUM<br>4. DISPERINDAG<br>5. SATPOL PP DAMKAR | Mei 2024       | Luncuran |
| 5 | BAGIAN ORGANISASI SETDA | Perda | Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara | Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)                                                                           | -    | Ubah | 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional                                                                                                                            | -  | Penjelasan/<br>Keterangan | 1. BAPPEDA<br>2. BKD<br>3. BAG. ORGANISASI                                                   | September 2024 | Luncuran |
| 6 | BAKESBANGPOL            | Perda | Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika                                 | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) | Baru | -    | 1. Permendagri 12/2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)<br>2. Perda Provinsi Jateng 1/2021 tentang Fasilitasi P4GN | NA | -                         | 1. DINSOSPERMASDES<br>2. DINKES<br>3. DISDIKPORA<br>4. RSUD                                  | Mei 2024       | Luncuran |

|   |             |       |                                                               |                                                                                                                                                                              |      |   |                                                                                                                                                               |    |   |                    |                |          |
|---|-------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------|----------------|----------|
| 7 | DISPERINDAG | Perda | Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jepara Tahun 2018-2038 | 1. Perencanaan & penetapan Kawasan Peruntukan industri<br>2. Penataan dan pengawasan pembangunan kawasan industri<br>- Pengembangan industri unggulan dan industri Potensial | Baru | - | 1. UU 3/2014 Tentang Perindustrian<br>2. UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang PP 14/2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035     | NA | - | 1. DPUPR<br>2. DLH | September 2024 | Luncuran |
| 8 | DISDIKPORA  | Perda | Penyelenggaraan Pemuda                                        | Penyadaran & Pemberdayaan Pemuda                                                                                                                                             | Baru | - | 1. UU 40/2009 tentang Kepemudaan PP<br>2. 41/2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan | NA | - | BAPPEDA            | Luncuran       | Luncuran |

|    |           |       |                                                                   |                                                                                    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |                                                                           |                |  |
|----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 9  | DISPARBUD | Perda | Pemberdayaan Desa Wisata                                          | Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Jepara                                       | Baru |  | 1. UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;<br>2. Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah;<br>3. Pergub Jateng No. 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov. Jateng No. 2 Tahun 2019 tentnag Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah                                                                                                           | -  | - | 1. BAPPEDA<br>2. DINSOSPERMASDES<br>3. BAG. PEREKONOMIAN<br>4. BAG. HUKUM | September 2024 |  |
| 10 | DISPARBUD | Perda | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya                          | Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya di Kabupaten Jepara                       | Baru |  | 1. UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;<br>2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   | 1. BAPPEDA<br>2. DPUPR<br>3. DISPARBUD<br>4. BAG. KESRA<br>5. BAG. HUKUM  | Mei 2024       |  |
| 11 | BAPPEDA   | Perda | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2025-2045 | Baru |  | Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | NA |   | Semua Perangkat Daerah                                                    | September 2024 |  |

|    |       |       |                                                                                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |                        |                |         |
|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------|----------------|---------|
| 12 | BPKAD | Perda | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023              |  | Baru | 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara<br>2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1/2020<br>3. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Seluruh SKPD |  | Penjelasan | Semua Perangkat Daerah | Juni 2024      | Reguler |
| 13 | BPKAD | Perda | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 |  | Baru | 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara<br>2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1/2020                                                                                                  |  | Penjelasan | Semua Perangkat Daerah | September 2024 | Reguler |
| 14 | BPKAD | Perda | Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025           |  | Baru | 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara<br>2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpu 1/2020<br>3. UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Seluruh SKPD |  | Penjelasan | Semua Perangkat Daerah | Agustus 2024   | Reguler |

